

Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi

¹Suherman, ²Faradilla Herlin, ³Rika Neldawaty, ⁴Rahmad Aldi Yanda

¹Universitas Muhammadiyah Jambi, suhermanrika17@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jambi, faradilla.surya@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Jambi, rikaneldawaty1079@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Jambi aldy1060@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled "The Influence of Regional Expenditures and Regional Economic Growth on Regional Financial Independence in Jambi Province. The research aims to measure and analyze: 1). Ratio of regional financial independence, development of regional spending and economic growth in districts/cities in Jambi Province during 2017-2023, 2). The influence of the regional financial independence ratio on regional expenditure in Regencies/Cities in Jambi Province and 3). The influence of the regional financial independence ratio on economic growth in Regencies/Cities in Jambi Province during 2017-2023. Data analysis uses quantitative and quantitative descriptive analysis methods, namely ratio, development and panel data regression. The results of research during 2017-2022 show that on average the districts/cities of Jambi Province have a very low independence ratio, the highest being Jambi City and the lowest being Sungai Full City. All regional expenditures experienced an increase, the highest in Bungo Regency and the lowest in Sungai Banyak City. GRDP all increased, the largest being Sungai Banyak City and East Tanjung Jabung Regency the lowest. The independence ratio has a positive and significant effect on regional expenditure or economic growth of districts/cities in Jambi Province at probability values of 0.0329 and 0.0352.

Keyword: Rasio Kemandirian, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu wilayah, baik ditingkat negara, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota perlu dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan tersebut dilakukan buat memajukan tingkat kemakmuran masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar daerah maupun negara yang dapat terjadi (Nuzullestary & Mulyaningsih, 2021) (Frisdiantara dan Mukhlis, 2017). Keberhasilan pembangunan suatu daerah atau negara dapat tercapai bila ada dukungan ketersediaan anggaran sebagai sumber pembiayaan dalam membiayai program-program pembangunan yang sudah direncanakan.

Kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah serta ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat di Kabupaten Kaimana menjadi latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Syam & Zulfikar, 2022). Permasalahan kemandirian keuangan daerah yang merupakan tujuan desentralisasi fiskal

dan otonomi sudah lama terjadi pada banyak negara. Penelitian (Bossò, Diana, & Asirah, 2021; Aji, Prakosa, Islami, & Retno, 2019) menemukan bahwa adanya ketergantungan yang sangat tinggi pemerintah daerah Korea dan Albania dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pada transfer keuangan pemerintah pusat. Banyaknya anggaran dari pusat membuat peran eksekusi desentralisasi fiskal melemah, karena pembiayaan hanya mengandalkan DAU dari pada menggunakan PAD sendiri. Sejumlah penelitian sebelumnya yang ada Indonesia menyebutkan faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah diantaranya Belanja Modal dan Belanja Pegawai (Defitri, 2020).

Besarnya program-program pembangunan yang dapat dibiayai dan dilaksanakan, khususnya daerah yaitu Kabupaten/Kota tentu membutuhkan sumber penerimaan yang besar. Besarnya anggaran yang harus disediakan oleh daerah dalam pembangunan sering menimbulkan masalah. Masalah yang sering terjadi pada Kabupaten/Kota adalah Ph terbatas kepemilikan sumberdaya alam (SDA) maupun manusia (SDM). Kedua sumber tersebut merupakan penentu bagi daerah dalam menggali potensi yang dimiliki menjadi sumber penghasilan (Aji, Prakosa, Islami, & Retno, 2019).

Keterbatasan tersebut, membuat daerah sulit untuk meningkatkan pendapatan, menjamin ketersediaan anggaran dalam pembangunan dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan daerah sebagai parameter ukuran keberhasilan dalam mengelola potensi yang ada sebagai sumber pendapatan. Kinerja keuangan yang baik, diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan daerah dalam mengeksplorasi sumber keuangannya dalam membiayai keperluan daerah dengan tidak menggantungkan diri pada pertolongan pemerintah pusat serta menggambarkan kemandirian keuangannya (Defitri, 2020).

Provinsi Jambi terdapat 11 kabupaten antara lain Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun . Saat ini belanja daerah dari tahun ke tahun dapat dikatakan selalu meningkat, hanya di Kabupaten Bungo pada tahun 2016 mengalami penurunan. Belanja daerah Kabupaten Batanghari pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 1.036.707.669.047,00 lalu pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 1.140.556.364.746,00. Sedangkan di kabupaten Bungo terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 1.174.216.297.589,00 yang sebelumnya adalah sebesar Rp. 1.259.935.359.967,00 pada tahun 2015. Belanja Daerah Kabupaten Merangin pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.064.467.262.391,02 lalu meningkat menjadi Rp. 1.377.598.204.653,47 pada tahun 2016. Pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Belanja Daerah tercatat sebesar Rp. 1.115.044.670.015,00 pada tahun 2015 lalu meningkat menjadi Rp. 1.574.888.399.213,00 pada tahun 2016. Lalu di Kabupaten Kerinci nilai Belanja Daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.041.825.614.167,93 dan meningkat menjadi Rp. 1.183.983.229.604,00 pada tahun 2016.

Peningkatan belanja daerah pada tahun 2015-2016 juga diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan PAD. Pertumbuhan ekonomi di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2015-2016 dapat dikatakan selalu meningkat, hanya pada kabupaten Tanjab Barat yang pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan sebesar 0,63%. Untuk jumlah penduduk, tiap-tiap daerah selalu mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk tertinggi terjadi di kabupaten Bungo pada tahun 2016 meningkat sebesar kurang lebih 7000 jiwa. Untuk PAD di 5 kabupaten induk di Provinsi Jambi, dari data yang tersedia, hanya pada kabupaten Batanghari dan kabupaten Merangin yang mengalami penurunan jumlah PADnya, sedangkan di daerah lain selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Berdasarkan data dan latar belakang tersebut

penelitian ini bertujuan untuk Provinsi Jambi, memiliki kemampuan untuk mandiri dari aspek keuangan daerah dapat dilihat dari realisasi pendapatan sebelas (11) Kabupaten/Kota. Dimana pendapatan Kabupaten/Kotanya tersebut memberikan kontribusi dalam kemandirian keuangan daerah provinsi Jambi.

Sedangkan selama 3 tahun rata-rata kenaikan pendapatan daerah Provinsi Jambi sebesar 23.9% pertahun, dimana presentase tersebut diperoleh dari sumbangan pendapatan dari 11 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kerinci 29.6%, Kabupaten Merangin menyumbang pendapatan daerah rata-rata 32.2%, Kabupaten Sarolangun 29.9%, Kabupaten Batang Hari sebesar 28.8%, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 31.4%, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 26.7%, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 35.6%, Kabupaten Tebo 26.7%, Kabupaten Bungo sebesar 31.8%, Kota Jambi sebesar 39.4% dan Kota Sungai Penuh 18.1%. Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah (ribu rupiah) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sudah menunjukkan penyerapan diatas 18% tahun dari anggaran daerah dan pusat. Artinya bahwa, Provinsi Jambi memiliki potensi untuk kemandirian dalam alokasi keuangan daerah untuk pelayanan public, biaya operasional untuk melaksanakan program kerja setiap Kabupaten/kota di provinsi Jambi, sehingga komposisi penyerapan dana APBN tidak 100% atau tidak 100% tergantung dari transfer dana pusat (APBN) dalam pembangunan dan pelayanan di daerah Jambi.

Menurut (Nuzullestary & Mulyaningsih, 2021) bahwa peningkatan pendapatan yang terjadi menggambarkan semakin membaiknya pengelolaan dan kinerja keuangan daerahnya. Semakin membaiknya pengelolaan dan kinerja keuangan daerah yang terjadi, diharapkan mampu mendorong peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah. Peningkatan rasio kemandirian yang terjadi, juga dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan otonomi daerah. (Anynda & Hermanto, 2020) menggambarkan kesanggupan daerah mengatur pemerintahannya serta mengurangi campur tangan pemerintah pusat

Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya. Disamping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu membiayai keuangannya secara mandiri dan juga untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mengelola keuangan daerahnya secara efisien dan efektif sehingga tujuan desentralisasi maupun tujuan daerah yang telah ditetapkan seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendidikan, meningkatnya PAD dapat dicapai.

Meningkatnya rasio kemandirian yang terjadi diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan anggaran yang digunakan sebagai sumber pembiayaan atau belanja daerah dalam pembangunan. Belanja daerah yang besar, akan mendorong pemerintah daerah bisa mendanai pengadaan sarana-prasarana juga bentuk investasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung (Bossy, Diana, & Asirah, 2021).

Pentingnya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam pembangunan, juga menjadi tujuan utama pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Kemandirian keuangan akan menjamin ketersediaan anggaran yang dapat diberikan dan akan memudahkan daerah dalam membiayai segala aktivitas atau program pembangunan yang telah ditetapkan. Besarnya aktivitas atau program pembangunan yang dapat dibayai, akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi (Handayani & Erinos, 2020).

Rasio Kemandirian Daerah yang diukur dengan rumus analisis rasio kemandirian daerah dan variabel Belanja Daerah (Anynda & Hermanto, 2020).

Kondisi diatas, juga berlaku pada wilayah di Provinsi Jambi. Upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan belanja daerah terus diupayakan dalam pembangunan. Pembangunan diharapkan mampu membuat kondisi perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan meningkat setiap tahunnya. Mengacu pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi di lihat dari kondisi pendapatan daerah dan belanja berfluktuasi dari tahun ketahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai akibat sumber pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, yaitu PAD dan belanja Daerah Jambi yang sah sebagian besar mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan daerah dan sumber pendapatan daerah ini diharapkan akan mampu meningkatkan rasio kemandirian keuangan pada Kabupaten/Kota (Renny Nur'ainy & Utomo, 2013).

Peningkatan pendapatan daerah yang terjadi diikuti oleh adanya peningkatan pada belanja hampir disemua Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Peningkatan belanja daerah Kabupaten/Kota yang terjadi, menyebabkan ketersedian anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan atau program pembangunan juga semakin meningkat. Peningkatan pendapatan dan belanja daerah yang terjadi diikuti pula oleh peningkatan perekonomian di hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, yaitu pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kondisi dan fenomena yang terjadi, maka peneliti ingin membuat kajian lebih mendalam tentang akibat yang ditimbulkan dari rasio kemandirian keuangan daerah dengan melihat peningkatan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk skripsi dengan judul: Pengaruh Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.

LITERATURE REVIEW

Keuangan Negara dan Daerah

Keuangan negara ialah hubungan antara uang masuk ke negara sebagai uang pemasukan atau pendapatan dan uang keluar sebagai uang belanja negara, akan tetapi keuangan negara tidak hanya membahas mengenai pendapatan dan belanja, tapi juga membahas mengenai hubungan antara keuangan negara dengan alokasi, distribusi, dan stabilisasi dari sumberdaya ekonomi, termasuk juga pertumbuhan ekonomi. Keuangan Negara berdasarkan UU Nomor. 17 Tahun 2003 mengatur keuangan negara di Indonesia, dimana pengelolaannya terdiri atas hak dan kewajiban, yaitu penerimaan negara dan pengeluaran negara. Pengelolaan keuangan negara haruslah dilakukan secara optimal demi kepentingan masyarakat, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Keuangan daerah adalah elemen yang erat kaitannya dengan keuangan negara, semakin besar keuangan daerah, akan memberi dampak peningkatan keuangan negara atau sebaliknya. Keuangan daerah adalah masalah pokok terkait pada penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan selayaknya (Halim, 2014).

Belanja Daerah

Permendagri No.64 tahun 2022 dan Nomor. 77 tahun 2022 menjelaskan, belanja daerah ialah semua pengeluaran yang dikeluarkan dan tidak diharapkan kembalikan oleh daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bentuk kewajiban daerah dalam satu

tahun anggaran. Pengertian belanja daerah bagi pemerintah yang dapat mengurangi nilai kekayaan bersih disebut dengan belanja (Handayani & Erinos, 2020).

Menurut penelitian Pembudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu belanja selain modal (belanja administrasi umum; belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; belanja transfer; belanja tak terduga) dan belanja modal. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Belanja Daerah di masing masing daerah sangat dipengaruhi kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan seberapa aktif aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan untuk masyarakat di periode tertentu. Aktivitas ekonomi ialah mode pemakaian input untuk menghasilkan output berupa barang dan jasa serta balas jasa yang timbul akibat dipakainya faktor produksi (Aji, Prakosa, Islami, & Retno, 2019). Menurut (Handayani & Erinos, 2020) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan PDRB perkapita. Kemandirian keuangan suatu daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembelaannya tanpa harus tergantung pemerintah pusat walaupun peran pemerintah tetap penting dalam pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan (Aji, Prakosa, Islami, & Retno, 2019).

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah keseluruhan hasil produksi yang berhasil diwujudkan suatu wilayah dan terjadi selama satu tahun tanpa melihat siapa pemilik kegiatan tersebut. PDRB dapat menjadi sebuah indikator ekonomi yang memuat berbagai macam instrumen ekonomi dan dapat menjelaskan keadaan makro ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pendapatan perkapita dan berbagai macam instrumen lainnya. Informasi yang didapat dari instrumen yang ada akan memudahkan membuat serta menetapkan kebijakan yang tepat agar pembangunan dapat terjadi secara efisien dan tepat (Bossy, Diana, & Asirah, 2021; Handayani & Erinos, 2020).

Ukuran Rasio Kemandirian

Kinerja terhadap keuangan daerah dilihat dari sisi penerimaan atau pendapatan ialah kemampuan sebuah daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (Anynda & Hermanto, 2020) Pengukuran tingkat kemandirian dapat dilakukan dengan menentukan rasinya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tolosang, 2018) menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dan variabel Belanja Modal dianggap faktor ini paling mampu mendeskripsikan kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai pemerintah sendiri, pembangunan maupun pelayanan pada masyarakat. Hasil penelitian Syam & Zulfikar,

(2022); dan Rante, Mire, & Paminto, (2017) menunjukkan bahwa Belanja langsung tidak signifikan, belanja tidak langsung signifikan dan penyertaan modal pemerintah daerah tidak signifikan terhadap PDRB secara langsung. Belanja langsung, tidak langsung signifikan dan PDRB tidak signifikan pada Tingkat Desentralisasi Fiskal.

Sedangkan Sijabat (2017) menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Fatiyah et al (2022) menyatakan bahwa hasil analisis rasio derajat ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun Anggaran 2016–2020 tergolong sedang dengan rata-rata rasio keseluruhan sebesar 63,60% artinya Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pembiayaan pembangunan masih bergantung dengan Dana transfer dari Pusat. Sedangkan untuk derajat kemandirian Keuangan daerahnya juga tergolong sedang/Partisipatif dengan rata-rata rasio keseluruhan 57,13%. Kesimpulan: Kontribusi Pendanan Asli daerah dalam mendanai pembiayaan pembangunan belum bisa sepenuhnya diandalkan dan masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian ini adalah Metode Deskriptif (mendeskripsikan), yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survei terhadap suatu kasus terkait kemandirian keuangan daerah Kabupaten /Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2022. Riset memakai data sekunder yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh instansi tertentu yang berbentuk *time series* selama tahun 2017-2022. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Indonesia; dan WEB Site Resmi instansi atau laporan-laporan yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam periode tahun 2017-2022 mengenai Belanja Daerah, pertumbuhan ekonomi dan rasio kemandirian keuangan daerah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian riset deskriptif data dan kajian pustaka dengan mempelajari serta menganalisis website resmi Biro Pusat Statistik tahun 2017-2022 dan juga website resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia serta WEB resmi terkait data yang relevan dengan penelitian ini.

Pendekatan Model Perhitungan Regresi Data Panel. Model umum regresi data panel dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + e_{it} \quad (3)$$

Dimana:

Y_{it} = variabel terikat

X_{it} = variabel bebas

e_{it} = error cross-section ke-i dan waktu ke-t

Penaksiran atau estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, dua diantaranya adalah Common Effect Model dan Random Effect Model. Model Common Effect yaitu teknik estimasi yang mengabaikan perbedaan aspek waktu/individu dan berasumsi perilaku data antara individu memiliki intersep dan slope pararel dalam beragam waktu/masa. Sedangkan Model Random Effects adalah cara estimasi dengan memasukkan unsur variabel pengganggu (residual) yang tidak saling berkorelasi antar waktu dan antara individu ke variabel tidak bebas, intersep yang konstan serta terkandung Error Correction Model (ECM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jambi 2017 - 2022

Uji Chow

Teknik ini diperlukan dalam rangka memastikan model *Common Effect* (CE) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang terbaik untuk mengestimasi persamaan regresi yang digunakan dan hasilnya adalah:

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	Df	Prob.
Cross-section F	7.215336	(10,54)	0.0000
Cross-section Chi-Square	56.001939	10	0.0319

Sumber: Data diolah (*Eviews 9, 2023*)

Hasil perhitungan menerangkan nilai Chi-Square memiliki Prob. $0,0319 < 0,05$ yang dipakai, sehingga menerima H1 dan menolak Ho. Berartimodel *Fixed Effect Model* lebih cocok dibanding model *Common Effect*.

Uji Hausman

Cara ini dipakai dalam upaya menentukan model *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang terbaik digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi dimana hasilnya sebagaimana berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi.Sq.df	Prob.
Cross-section random	5.962215	1	0.0246

Sumber: Data diolah (*Eviews 9, 2023*)

Hasil perhitungan diperoleh Prob nilai Chi-Square Statistic $0,0246 < 0,05$, sehingga menerima H1 dan menolak Ho. Artinya model *Fixed Effect Model* lebih akurat daripada model *Random Effect*.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Berlandaskan hasil pengujian pemilihan model yang telah dikerjakan,maka *Fixed Effect* adalah model yang dipakai dan didapat hasil :

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	20.04635	8.563886	164.0184	0.000

Rasio Kemandirian	0.039125	0.010208	3.832778	0.0329125
Fixed Effects (Cross)				
Kota Jambi	21.215040			
Bungo	20.864.016			
Kerinci	-4.163900			
Tanjabbar	20.981675			
Tanjabtim	-20.818330			
Tebo	-20.748335			
Sungai Penuh	-20.430071			
Merangin	21.036675			
Sarolangun	-20.876597			
Muaro Jambi	20.926672			
Batanghari	20.893335			

Sumber: Data diolah (*Eviews 9, 2023*)

Dari hasil diatas dapat ditentukan persamaannya :

$$\ln Y_1 = 20,04635 + 0,039125X_1$$

Berdasarkan persamaan diatas, langkah menjelaskan angka-angka yang didapat. Dimana penjelasnya adalah :

- Nilai konstan (intersep) keseluruhan adalah 20,04635, ini berarti bilavariabel independen tidak berubah (konstan) maka variabel dependenyaitu belanja daerah ada sebesar 20,04635.
- Rasio kemandirian sebesar 0,039125, dimana tingkat kemandirian keuangan dalam meningkatkan belanja daerah adalah 0,039125 pada seluruh kabupaten dan kota.
- Nilai konstanta ditiap-tiap kabupaten dan kota tanpa memasukkan pengaruh unsur waktu serta daerah lainnya, maka belanja daerah Kabupaten Merangin memiliki nilai intersep terbesar 41,083025 sementara terendah adalah Kota Sungai Penuh -0,383721.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jambi

Hasil Uji Chow

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	df	Prob.
Cross-section F	67.031999	(10,54)	0.0048
Cross-section Chi-Square	171.352449	10	0.0153

Sumber: Data diolah (*Eviews 9, 2023*)

Dari tabel 4 diperoleh nilai Chi-Square dengan Prob. $0,0153 < 0,05$, artinya menerima H1 dan menolak Ho. Model *Fixed Effect* adalah yang dipakai, karena terbaik dibandingkan model *Common Effect*.

Hasil Uji Hausman

Tabel 5. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi.Sq.df	Prob.
Cross-section random	0.727594	1	0.0037

Sumber: Data diolah (*Eviews 9, 2023*)

Dari perhitungan ditemukan Prob Chi-Square Statistic $0,0037 < 0,05$ dan menerima H1 serta menolak Ho. Dengan demikian model *Fixed Effect Model* yang dipakai karena lebih baik dari model *Random Effect*.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan uji model dan perhitungan regresi yang dilakukan didapat hasil :

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	4.606926	1.324364	3.478595	0.0038
Rasio Kemandirian	0.189926	0.058662	3.237633	0.0352
Fixed Effects (Cross)				
Kota Jambi	-0.835884			
Bungo	-2.635398			
Kerinci	1.779842			
Tanjabbar	-1.477294			
Tanjabtim	-4.142788			
Tebo	2.285390			
Sungai Penuh	1.543490			
Merangin	1.916218			
Sarolangun	-1.893458			
Muaro Jambi	1.615263			
Batanghari	-0.155381			

Sumber: Data diolah (*Eviews 9, 2023*)

Dengan berlandaskan hasil diatas disusun bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_2 = 4,606926 + 0,189926X_1$$

Penjelasan persamaan diatas adalah :

- Nilai konstan (intersep) keseluruhan adalah 4,606926, bila variabel independen tetap, maka variabel dependen yaitu PDRB ada sebesar 4,60692.
- Rasio kemandirian sebesar 0,189926, dimana tingkat kemandirian keuangan mampu menaikkan PDRB sebesar 0,189926 pada seluruh kabupaten dan kota.
- Nilai konstanta pada setiap kabupaten dan kota tanpa memasukkan pengaruh unsur waktu serta daerah lainnya, maka Kabupaten Tebo memiliki nilai intersep tertinggi 6,892316 sementara terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 0,464138.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-398.224	863.791		-.461	.657

Belanja Daerah	1.473	.821	.599	1.795	.110
Pertumbuhan Ekonomi	.505	.879	.192	.575	.581

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien belanja daerah sebesar nilai t-hitung 1.795 dengan probabilitas untuk variabel belanja daerah sebesar prob = 0.110 ini menunjukkan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan Provinsi Jambi. Ini menunjukkan setiap peningkatan 1% belanja daerah akan meningkatkan cadangan devisa sebesar 0.1795%.

Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar nilai t-hitung 0.575 dengan probabilitas 0.581 menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan Provinsi Jambi. Ini menunjukkan setiap peningkatan 1% ekspor akan meningkatkan cadangan devisa sebesar 0.575%.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deret waktu (*time series*) selama 6 tahun, yang dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Sebelum membuat model estimasi regresi data panel, penulis melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar penelitian menjadi tidak biasa. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji chow, uji hausman. Penelitian ini juga menggunakan uji statistik seperti. Uji t (uji parsial) dan uji estimasi regresi data panel.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh antara seluruh variable independen yaitu Belanja Daerah terhadap variable dependen yaitu Kemandirian Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	612347.890	2	306173.945	1.646	.252 ^b
Residual	1487829.019	8	185978.627		
Total	2100176.909	10			

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 5.12 dapat dilihat bahwa probabilitas F hitung memiliki nilai sebesar 1.646 dengan probabilitas 0.252 yang mana lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha 0.05 ($0.000000 > 0.05$). Dengan hasil tersebut maka H_0 diterima. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa variable independen yakni belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan Provinsi Jambi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk melihat pengaruh dari variable-variabel independen terhadap variable dependen dapat dilakukan dengan cara melihat nilai koefisien determinasinya. Untuk melihat koefesien determinasi dengan cara mengukur nilai Adjusted R-Squared berdasarkan tabel 5.14

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540 ^a	.292	.114	431.252

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah

Terlihat bahwa Adjusted R-Squared mempunyai nilai sebesar 0.114 atau 29,2% dengan hasil variasi variable kemandirian keuangan yang dapat dijelaskan oleh variable belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya 7,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh positif rasio dan signifikan kemandirian keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi juga belanja daerah pada probabilita 0,0352 dan 0,0329 di kabupaten/kota Provinsi Jambi perlu dipertahankan dan diupayakan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah di masing-masing daerah, khususnya lewat PAD. peningkatan PAD yang terjadi dapat mendorong naiknya derajat kemandirian tersebut serta mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah diatasnya. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendorong naiknya PAD dapat dilakukan melalui :

1. Melakukan perluasan (ekstensifikasi) jenis penerimaan PAD, baik dari pajak, retribusi, laba bagi hasil usaha milik daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Banyaknya jenis penerimaan yang dapat dipungut diharapkan dapat mendorong naiknya PAD dan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sumber tersebut terhadap PAD serta penerimaan daerah secara keseluruhan yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan sumber-sumber penerimaan PAD yang telah ada secara lebih intensif. Kondisi ini perlu dapat diterapkan dengan memanfaatkan dan menggali potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten/Kota secara lebih optimal untuk dapat dijadikan sebagai sumberpendapatan.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang dan mengevaluasi tarif dari sumber-sumber PAD secara berkala. Upaya ini dilakukan agar dapat diketahui sumber penerimaan mana yang benar-benar memberikan hasil yang besar dan kecil, sehingga dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan apa yang tepat untuk di ambil dimasa datang.
4. Pemerintah kabupaten/kota perlu membuat payung hukum atas setiap pungutanyang dilakukan, sehingga apa yang dilakukan memiliki dasar hukum yang tetap dan tidak

membebani masyarakat.

5. Perlu upaya pemerintah memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan lewat peningkatan pengetahuan tentang keuangan, keterampilan dan penguasaan teknologi serta menempatkan pegawai/petugas sesuai keahliannya.
6. Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi pada masyarakat/subjek pajak tentang pentingnya membayar pajak, iuran atau kewajiban lainnya pada pemerintah bagi pembangunan.

Kebijakan yang dapat dilakukan diatas diharapkan akan mendorong meningkatnya ketersediaan anggaran sebagai sumber pembiayaan dalam membiayai belanja program/kegiatan pembangunan. Belanja yang dilakukan kabupaten/kota hendaknya berdasarkan sekala prioritas dan harus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Belanja daerah juga harus bisa dirasakan dan menyentuh kepentingan publik/masyarakat secara langsung serta secara luas. Kondisi diatas nantinya dapat menggerakkan perekonomian daerah semakin lebih baik serta mampu dijadikan sebagai potensi meningkatkan pendapatan didaerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap belanja daerah, pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan Provinsi Jambi dengan menggunakan uji regresi data panel, maka didapatkan kesimpulan bahwa rata-rata rasio kemandirian kabupaten/kota Provinsi Jambi rendah sekali, tertinggi Kota Jambi dan terendah Kota Sungai Penuh. Belanja semua daerah meningkat, tertinggi Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh terendah. PDRB semua meningkat, terbesar Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling rendah. Rasio kemandirian mempengaruhi belanja daerah secara positif dan signifikan pada nilai probabilita 0,0329 pada kabupaten/kota Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi rasio kemandirian secara positif dan signifikan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dengan probabilita 0,0352.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu Rendahnya rasio kemandirian perlu adanya upaya meningkatkan pendapatan dengan cara perluasan jenis dan pengoptimalan pungutan penerimaan khususnya dari PAD, belanja daerah perlu terus meningkat dalam upaya mempercepat proses dan pencapaian tujuan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat lewat belanja langsung sementara pertumbuhan ekonomi ditingkatkan melalui menaikkan anggaran belanja pada sektor potensial berkembang, mendorong pengembangan masuknya investasi, menyederhanakan peraturan perizinan usaha dan menjaga stabilitas harga oleh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jambi. Pengaruh positif rasio kemandirian terhadap belanja hendaknya terus dinaikkan dengan upaya pemanfaatan potensi yang ada didaerah menjadi sumber pendapatan, baik yang diusahan pemerintah daerah ataupun pusat sehingga mendorong naiknya anggaran belanja disetiap daerah. Peningkatan kemandirian keuangan terus diusahakan naik dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan. usaha ini diperlukan dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran dalam membiayai seluruh kegiatan

pembangunan dalam rangka menaikkan produksi barang dan jasa (pertumbuhan ekonomi) berdasarkan skala prioritas di masing-masing wilayah/daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, J., Prakosa, Islami, S. F., & Retno. (2019). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Volume 4 Nomor 1., 34-42.
- Anynda, & Hermanto. (2020). Anynda, dan Hermanto. 2020. "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 9-20.
- Bosso, E., Diana, F., & Asirah, A. (2021). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara. *Patria Artha Journal of Accounting and Financial Reporting*, 93-104.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2023
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 107-119.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, Jakarta. .
- Handayani, T. U., & Erinos. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2348-2361.
- Holung, R. L., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. (2021). Pengaruh Kemandirian KEuangan Daerah, Kinerja KEuangan DAera dan Belanja Modal TERhadap Pertumbuhan EKonomi di Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 56-63.
- Jambi.bps.go.id. (2022). Realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-jambi-ribu-rupiah-.html. Jambi: BPS Jambi.
- Nasution, S. M. (2022). Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jambi-Mei-2022.pdf. Jambi: Bank Indonesia Perwakilan Jambi.
- Nuzullestary, V., & Mulyaningsih, E. (2021). Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019,. *Tirtayasa Ekonomika* Volume. 16 Nomor 1 , 15-23.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis kemandirian keuangan daerah. *Inovasi* Volume 13 (2), 78-89.
- Rasdalima, R. J. (2017). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Efisiensi*, 134-145.
- Renny Nur'ainy, D., & Utomo, R. B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Aslidaerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat). Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) (pp. 95-104). Bandung.: PESAT.

- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Akuntansi Bisnis dan Publik*, 27-37.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi : teori pengantar*. Depok : Rajawali Pers.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bali: <https://simdos.unud.ac.id/>.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* Vol. 2, , 98-114.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkatkemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 18 No. 03 Tahun 2018, 79-92.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Edisi kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R. K. (2020). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 6, No.2, 182-191.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* Vol 3 No 2 , 465-72.
- Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Wiriani, E. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Samudra Ekonomika*, VOL. 3, NO. 1, 65-73.